

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi merupakan proses yang menggambarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga terbentuknya suatu hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam upaya untuk membuka lapangan kerja baru, dan mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad,1999).

Pembangunan Ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, guna untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang bagus dan distribusi pendapatan masyarakat yang lebih merata di setiap daerah. Pertumbuhan Ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat melalui nilai PDRB rill di daerah tersebut. PDRB rill yaitu nilai output barang dan jasa total yang diproduksi disuatu daerah dengan perhitungan angka konstan. Permasalahan yang terjadi pada proses peningkatan PDRB rill di daerah memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang dilakukan pemerintah harus diidentifikasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai supaya dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kendala serta hambatan dapat terjadi apabila pada proses pembangunan tidak bersinerginya faktor-faktor pendukung pembangunan tersebut.

Menurut Sukirno(1995) Pertumbuhan Ekonomi daerah dapat diartikan sebagai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa melihat tingkat pertumbuhan penduduk di daerah tersebut.

Dari definisi ini diketahui, bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebagai ukuran dasar perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah. Pertumbuhan Ekonomi dapat bernilai positif maupun negatif. Pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif mencerminkan aktivitas perekonomian pada periode tersebut mengalami kenaikan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi negatif mencerminkan bahwa aktivitas perekonomian pada periode tersebut mengalami penurunan. Dengan kata lain, Pertumbuhan Ekonomi mencerminkan kondisi perekonomian disuatu Negara, tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bagus dan tinggi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.340.800 jiwa dan juga memiliki potensi yang besar baik dari pariwisata maupun budaya yang sangat kaya. Jawa barat juga memiliki banyak kontribusi terhadap Indonesia diantaranya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebanyak 14.33%, kontribusi terhadap produk domestik (PDB) Sektor Industri Manufaktur sebanyak 60%, Kontribusi Penanaman modal asing (PMA) 34.46 % terhadap nasional, dan Produsen Beras Nasional sebanyak 17,76%. Selain itu Jawa Barat juga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi terhadap ibu kota Negara

sebagai penyedia air baku, penyedia bahan pangan, dan penyedia lahan serta infrastruktur mendukung.

Pembangunan nasional mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga pada akhirnya mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang menjelaskan bahwa perkembangan PDRB yang terjadi di provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
PDRB atas Dasar Harga konstan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017
(Juta Rupiah)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2013	1.093.543,55
2014	1.149.216,06
2015	1.207.083,41
2016	1.275.546,48
2017	1.342.953,38

Sumber: Jawa Barat dalam angka, BPS

Di lihat dari tabel 1.1 secara keseluruhan PDRB Provinsi Jawa Barat mulai dari tahun 2013-2017 mengalami laju dan fluktuatif. Pada tahun 2013 PDRB Jawa barat dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha

sebesar 1.093.543,55 juta rupiah. Pada tahun 2015 PDRB mengalami kenaikan menjadi 1.149.216,06 juta rupiah hal ini didukung dan didorong oleh peningkatan pada semua sektor kecuali sektor pengadaan listrik dan gas. Selanjutnya pada tahun 2015 PDRB mengalami kenaikan lagi menjadi 1.207.083,41 Juta rupiah. Tahun 2016 semua sektor ekonomi mengalami peningkatan kecuali sektor pertambangan dan penggalian, berakibat pada kenaikan PDRB menjadi 1.275.546,48 Juta rupiah. Tahun 2017 Jawa Barat mengalami kenaikan PDRB yang cukup tinggi yaitu sebesar 1.342.953,38 Juta rupiah.

Pengkajian akan faktor yang dapat mempengaruhi nilai PDRB harus dilakukan secara teliti dan sistematis supaya pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak salah sasaran. Arah hubungan dan dampak yang ditimbulkan dari masing-masing faktor terhadap PDRB juga harus dikaji lebih mendalam, apakah faktor yang terkait benar-benar memberi pengaruh yang besar dan baik terhadap PDRB. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai PDRB. Namun peran faktor-faktor tersebut perlu dilakukan pengujian yang lebih mendalam, apakah benar faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang besar dan baik bagi PDRB.

Tabel 1.2

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2013	8.485,71
2014	15.038,15
2015	16.263,24
2016	16.180,21
2017	16.524,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 1.2 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8.485,71 Juta rupiah dan menjadi 15.038,15 Juta rupiah pada tahun 2014, Kenaikan yang cukup tinggi terjadi karena peningkatan pajak daerah sangat tinggi dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 16.263,24 Juta rupiah dan menjadi 16.180,21 Juta Rupiah pada tahun 2016, penurunan nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun 2016 terjadi karena penurunan kontribusi dari Lain-lain PAD yang Sah. Tahun 2017 kontribusi dari lain-lain PAD yang Sah relatif tinggi berakibat pada peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah menjadi 16.524,12 Juta rupiah.

Kartikaarli (2015) menjelaskan bahwa upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya dapat diwujudkan dengan sistem keuangan yang baik dari segi pendapatan dan juga pengeluaran sehingga membuat pemerintah daerah memiliki kemandirian dari segi keuangan dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

Tabel 1.3

Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (Jiwa)

Tahun	Tenaga Kerja
2013	18.731.943
2014	19.230.943
2015	18.791.482
2016	19.202.038
2017	20.551.575

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Angka pada tabel 1.3 diatas adalah Angka Tenaga Kerja pada usia kerja yang ada di Provinsi Jawa Barat (15-64 tahun). Pada tahun 2013 Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat sebanyak 18.731.43 jiwa dan menjadi 19.230.943 jiwa pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 18.791.481 jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan karena tingkat Upah Minimum Provinsi rendah sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja berhenti bekerja atau berpindah ke daerah yang memiliki Upah Minimum Provinsi yang lebih tinggi. Tahun 2015 akhir dilakukan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat akibat dari demo yang dilakukan para buruh, Revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) menarik tenaga kerja untuk bekerja di Provinsi Jawa Barat sehingga Tenaga kerja menjadi 19.202.038 jiwa.

Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun berikutnya 2017 sebesar 20.551.575 jiwa.

Suryanto dwi (2011) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk dapat menjadi pendorong bahkan penghambat dalam roda perekonomian. Jumlah penduduk yang tinggi dan terus bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja serta tingkat konsumsi masyarakat. Namun di sisi lain, dampak negatif dari jumlah penduduk yang tinggi dan terus bertambah tetapi tidak diimbangi dengan kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melemah berakibatkan tidak sejalanannya dengan tujuan pemerintah yaitu peningkatan kesejahteraan.

Tabel 1.4
PMDN di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2013	26.018.005,2
2014	37.907.601,2
2015	26.272.865,6
2016	114.930.436,0
2017	230.454.707,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.4 nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat, menunjukkan adanya fluktuasi. Pada Tahun 2013 nilai PMDN sebesar 26.018.005 Juta Rupiah dan menjadi 37.907.601,2. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2014 didukung peningkatan dari segi investasi oleh proyek PMA, PMDN wajib LKPM, dan Proyek PMDN Non LKPM. Pada Tahun 2015 nilai PMDN mengalami penurunan menjadi 26.272.865,6 Juta Rupiah. Penurunan yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan penurunan minat dan realisasi dari PMDN. Tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada sektor Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi sebesar 114.930.436,0. Peningkatan yang sangat tinggi didukung oleh kebijakan yang dilakukan pemerintah dan minat investor yang sangat tinggi untuk menanamkan modal di wilayah Provinsi Jawa Barat. Peningkatan minat investor terus bertambah sehingga pada tahun 2017 nilai PMDN di Provinsi Jawa Barat sebesar 230.454.707,0 Juta Rupiah.

Tabel 1.5

UMP di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (Rupiah)

Tahun	Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK)
2013	850.000
2014	1.075.000
2015	1.185.750
2016	1.312.355
2017	1.420.624,00

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka

Berdasarkan pada tabel 1.5 Upah Minimum provinsi (UMP) mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sebesar 850.000 Rupiah menjadi 1.075.000 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 Upah minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2015 sebesar 1.185.750 Rupiah, tahun 2016 sebesar 1.312,355 Rupiah. Kenaikan Upah Minimum Pemerintah mengalami peningkatan dirujuk dari Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan sehingga Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan ada tahun 2017 sebesar 1.420.624 Rupiah.

Dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Barat sudah memiliki banyak keberhasilan yang dicapai, namun tidak dapat dipungiri juga terdapat beberapa kendala dan kegagalan dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi yang baik memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan

ekonomi yang baik selaras dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana salah satu tolak ukur dalam melihat pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam variabel dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi PDRB.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa dan melakukan penelitian dengan Judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2017)*”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017?
2. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017?
3. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2013-2017?
4. Apakah Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa, guna untuk melatih dan mengasah kemampuan otak untuk dapat berpikir secara kritis dengan mengidentifikasi masalah serta menganalisis pengaruh dan situasi yang terjadi di lingkungan sekitar terkhusus pada sektor ekonomi sehingga mahasiswa lebih dapat memahami permasalahan yang dihadapi pada saat ini.
2. Bagi Masyarakat, dapat digunakan sebagai penambah wawasan terkait situasi terkini dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil nantinya terkhusus dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan masyarakat.

3. Bagi Pihak Lain, diharapkan dapat membantu atau menjadi inspirasi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, dan bermanfaat sebagai bahan pustaka.
4. Bagi Penulis, Penelitian ini merupakan penerapan dari hasil teori akademis yang telah didapatkan di bangku perkuliahan sekaligus sebagai tolak ukur kemampuan menganalisa dengan permasalahan yang dihadapi, dan juga sebagai tugas akhir yang merupakan syarat dalam meraih gelar Sarjana dalam bidang ekonomi jurusan ilmu ekonomi di Universitas Islam Indonesia.

